

Efektivitas Platform Kecerdasan Buatan Berbasis Percakapan dalam Optimalisasi Riset Hukum

Maria Yuniar Ardhiati^{1*}

¹Unika Atma Jaya Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of Ask Hukumonline AI, an artificial intelligence feature developed by Hukumonline, in providing answers to legal questions. The research was conducted using a qualitative approach, comparing the responses generated by Ask Hukumonline AI with those from ChatGPT and Gemini, two other AI platforms. The findings showed that, in terms of accuracy, Ask Hukumonline AI outperformed both ChatGPT and Gemini in delivering legal information specific to Indonesia. Thus, it can be concluded that Ask Hukumonline AI is more effective than ChatGPT and Gemini for supporting legal research.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas Ask Hukumonline AI sebagai fitur kecerdasan buatan yang dikembangkan Hukumonline, dalam menghadirkan jawaban bagi pertanyaan seputar hukum. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif, dengan membandingkan jawaban yang diberikan oleh Ask Hukumonline AI dan ChatGPT serta Gemini sebagai platform kecerdasan buatan lainnya. Sebagai hasilnya, dari sisi akurasi, Ask Hukumonline AI terbukti lebih akurat dibandingkan ChatGPT dan Gemini dalam memberikan jawaban seputar hukum di Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apabila dibandingkan dengan ChatGPT dan Gemini, Ask Hukumonline AI lebih terbukti efektif untuk membantu riset di bidang hukum.

KONTAK

adikmaria@gmail.com

KATA KUNCI

AI, Riset, Hukum

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Salah satu inovasi teknologi yang semakin berkembang adalah kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). AI telah berhasil diaplikasikan di berbagai industri, seperti manufaktur dan kesehatan, dan kini mulai merambah dunia hukum.

Penggunaan AI dalam profesi hukum memiliki potensi besar untuk memberikan berbagai manfaat, termasuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan penghematan biaya. AI dapat mendukung pengacara dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya berulang dan memakan waktu, seperti riset hukum dan peninjauan dokumen, sehingga mereka bisa lebih fokus pada penyelesaian tugas-tugas hukum yang lebih kompleks (Kabir & Alam, 2023). Nilai tambah inilah yang menjadikan AI berpotensi menyederhanakan riset hukum di masa kini dan masa mendatang.

Di Indonesia, hukum merupakan bidang yang sangat dinamis, dengan regulasi yang terus berubah dan berkembang. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh peneliti dan praktisi hukum adalah dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tantangan pun menjadi semakin tinggi lantaran kurangnya dokumentasi yang baik mengenai perubahan regulasi di ruang digital, yang membuat proses pencarian informasi menjadi rumit dan memakan waktu.

Padahal, akses yang terbuka terhadap dokumentasi hukum akan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami kebijakan pemerintah dan regulasi yang diterapkan. Mantan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly menyatakan bahwa akses keterbukaan terhadap dokumentasi dan informasi hukum nasional harus dibuka seluas-luasnya agar kebijakan pemerintah dalam berbagai regulasi dapat diterima secara menyeluruh oleh masyarakat (Detik.com, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi hukum merupakan elemen krusial dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan hukum di Indonesia.

Selain itu, dari perspektif akademisi, Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Rahmat Dwi Putranto, menekankan pentingnya sikap positif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, hal ini sangat relevan bagi lulusan sarjana hukum, yang harus progresif dalam membangun bangsa dengan cara memanfaatkan teknologi yang hadir di tengah kehidupan sehari-hari (Hukumonline, 2022). Pandangan ini menegaskan bahwa adaptasi terhadap teknologi bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai strategi penting dalam membentuk sistem hukum yang inovatif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Di Indonesia, meskipun penerapan teknologi AI di sektor hukum masih tergolong baru, potensi besar AI untuk mengoptimalkan riset hukum diakui oleh para praktisi. Platform AI berbasis percakapan, dengan kemampuan menganalisis dokumen hukum dan menawarkan rekomendasi, diharapkan dapat memberikan solusi praktis terhadap permasalahan akses informasi hukum yang sering kali rumit dan tidak terpusat. Selain itu, waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melakukan riset hukum pun bisa dipangkas.

Lebih lanjut, penelitian ini menjadi penting mengingat semakin dinamika regulasi di Indonesia, yang menuntut adanya alat bantu untuk mempercepat dan mempermudah proses riset hukum. Dengan memanfaatkan teknologi AI berbasis percakapan, peneliti dan praktisi hukum dapat semakin produktif dalam menjalankan berbagai riset di bidang hukum. Sebagai dampak dalam jangka panjang, dunia hukum Tanah Air semakin kaya akan riset hukum.

Tak dapat dipungkiri,, platform kecerdasan buatan generatif memiliki potensi untuk meningkatkan inklusivitas. Sebab, teknologi tersebut memungkinkan akses yang lebih luas kepada masyarakat umum untuk memperoleh informasi hukum yang kredibel dan valid. Evaluasi terhadap kecepatan, ketepatan, dan validitas hasil pencarian melalui platform ini pun menjadi krusial untuk memastikan bahwa teknologi tersebut dapat diadopsi secara luas dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan riset hukum di Indonesia. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan teknologi AI dalam sistem hukum nasional, serta membuka jalan bagi inovasi yang lebih besar di masa mendatang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas tiga platform kecerdasan buatan berbasis percakapan, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Ask Hukumonline AI, dalam membantu riset hukum, khususnya dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang spesifik. Metode kualitatif dipilih karena memberikan pendekatan yang lebih mendalam dalam memahami dinamika dan kemampuan setiap platform dalam memfasilitasi pencarian dokumen hukum yang valid dan terkini. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus.

Pengujian dilakukan pada ketiga platform tersebut untuk menemukan peraturan perundang-undangan tertentu. Akurasi hasil pencarian menjadi fokus utama analisis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelebihan dan ruang pengembangan bagi masing-masing platform dalam konteks hukum Indonesia. Terlebih, perubahan regulasi sering kali terjadi secara dinamis. Hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai kemampuan kecerdasan buatan yang secara efektif dapat menyederhanakan proses riset hukum, serta keandalan platform-platform tersebut dalam memberikan informasi hukum yang kredibel dan terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

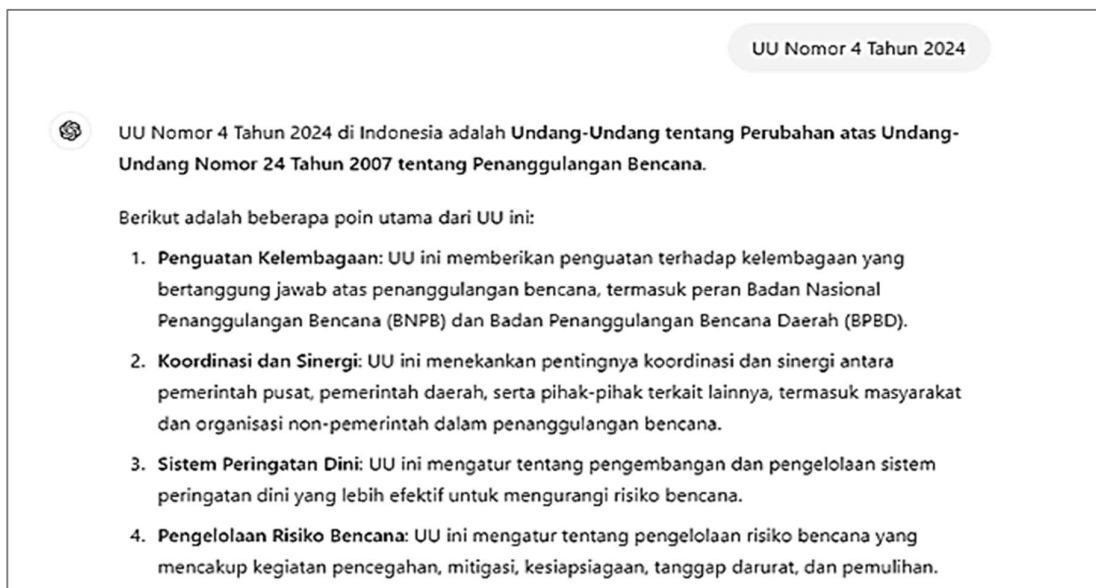
Penelitian menggunakan metode kualitatif dilakukan melalui ChatGPT, Gemini, dan Ask Hukumonline AI untuk mencari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Pertama, pencarian dilakukan menggunakan ChatGPT. Hasilnya memperlihatkan ketidakakuratan. Sebab, ChatGPT malah menampilkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Namun setelah melakukan pencarian untuk kedua kalinya, ChatGPT menampilkan permohonan maaf karena menampilkan hasil yang keliru. Selanjutnya, ChatGPT berhasil memperlihatkan poin-poin penting dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Kedua, pencarian dilakukan menggunakan Gemini. Hasil yang muncul serupa dengan pencarian untuk kedua kalinya memakai ChatGPT. Hasilnya memperlihatkan poin-poin penting dalam UU tersebut. Yang membedakan dari pemakaian ChatGPT adalah adanya rujukan pada JDIH Kemen PPA dan Hukumonline untuk hasil pencarian dengan Gemini.

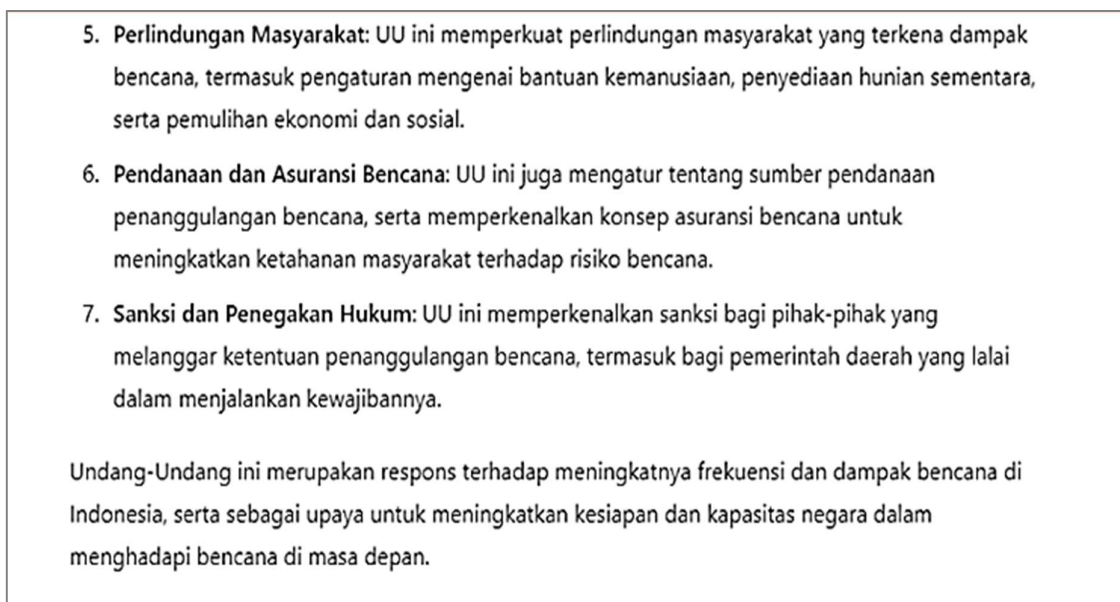
Ketiga, pencarian dilakukan memakai Ask Hukumonline AI. Dengan menggunakan platform ini, hasil yang muncul akurat disertai dengan salinan undang-undang. Sebagai hasilnya, peneliti tidak hanya memperoleh poin-poin penting dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tapi juga semua isinya melalui salinan tersebut.

Perbandingan Hasil Pencarian dengan ChatGPT, Gemini, dan Ask Hukumonline AI

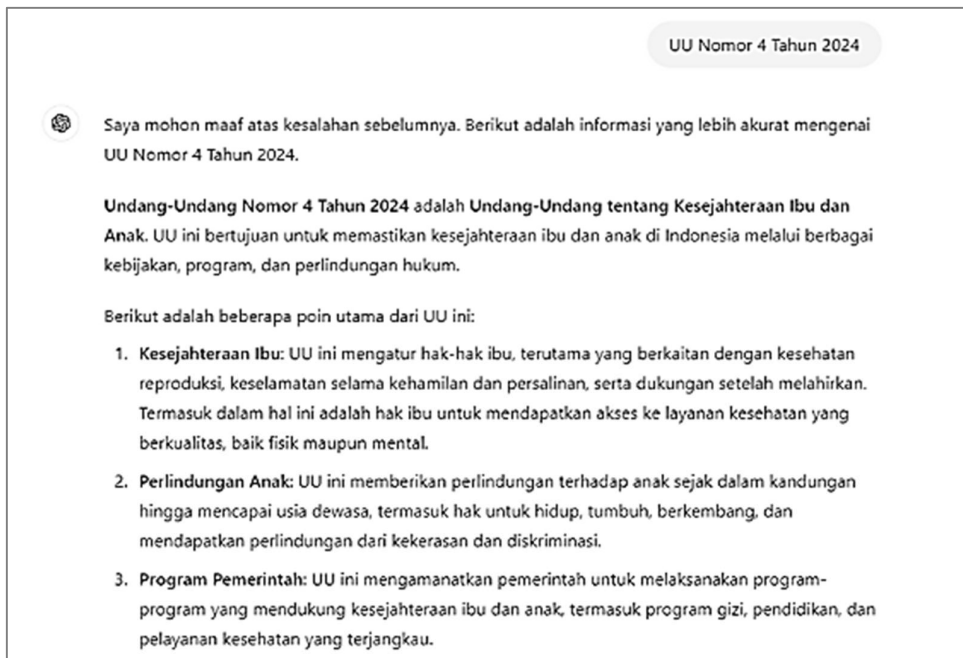
Berikut ini hasil pencarian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU No. 4/2024). Pencarian dilakukan pada 3 Agustus 2024. Dalam melakukan pencarian, peneliti mengetikkan “UU Nomor 4 Tahun 2024” di kolom pertanyaan pada ChatGPT, Gemini, dan Ask Hukumonline AI.



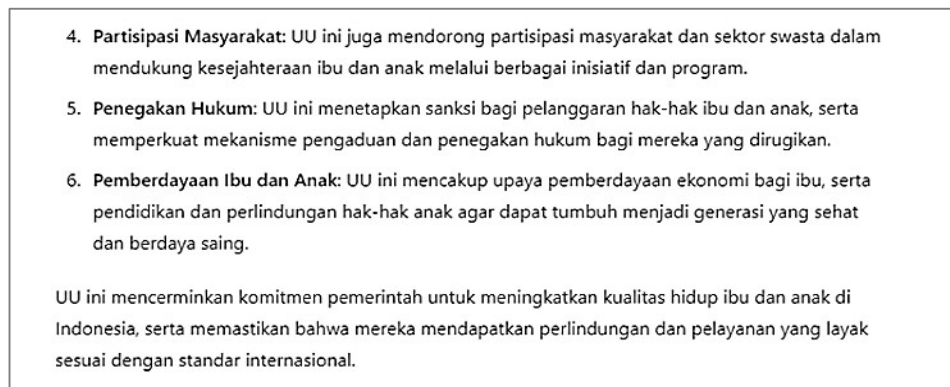
Gambar 1.a. Hasil Pencarian Pertama UU No. 4/2024 Menggunakan ChatGPT



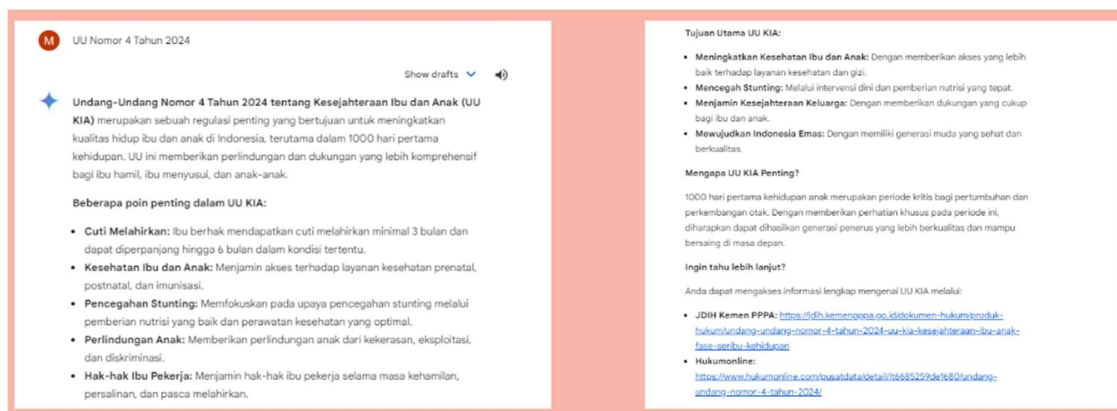
Gambar 1.b. Lanjutan Hasil Pencarian Pertama UU No. 4/2024 Menggunakan ChatGPT



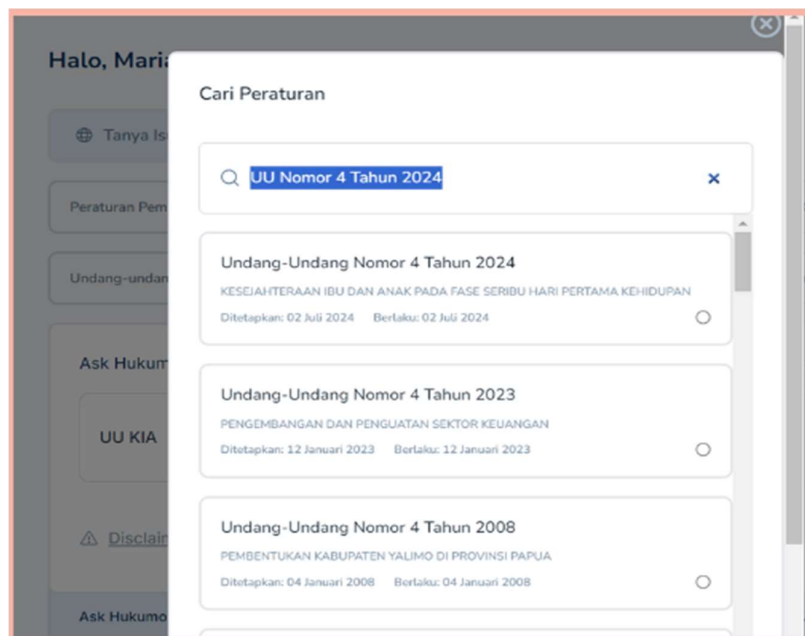
Gambar 2.a. Hasil Pencarian Kedua UU No. 4/2024 Menggunakan ChatGPT



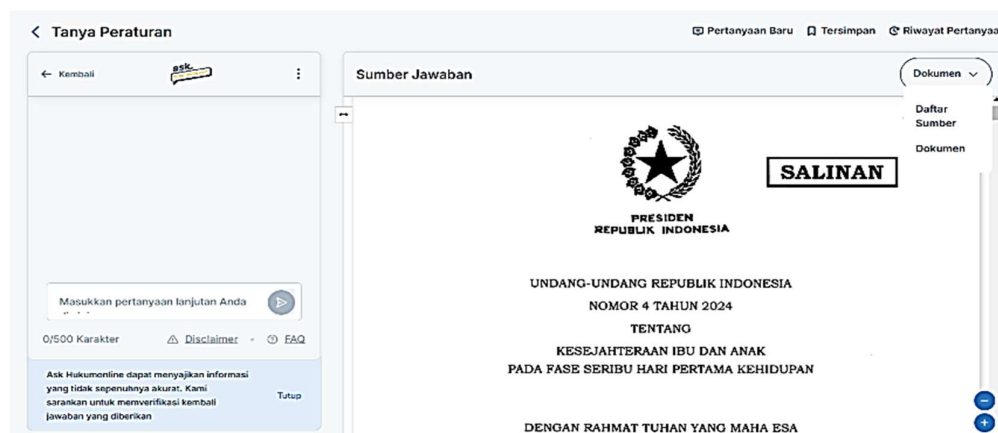
Gambar 2.b. Lanjutan Hasil Pencarian Kedua UU No. 4/2024 Menggunakan ChatGPT



Gambar 3. Hasil Pencarian UU No. 4/2024 Menggunakan Gemini



Gambar 4.a. Hasil Pencarian UU No. 4/2024 Menggunakan Ask Hukumonline AI



Gambar 4.b. Lanjutan Hasil Pencarian UU No. 4/2024 Menggunakan Ask Hukumonline

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang membandingkan efektivitas tiga platform kecerdasan buatan berbasis percakapan, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Ask Hukumonline AI dalam mencari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa setiap platform memiliki keunggulan dan ruang untuk pengembangannya masing-masing. Pada percobaan pertama, ChatGPT menunjukkan ketidakakuratan dalam hasil pencarian. Namun percobaan kedua berhasil menyajikan informasi yang sesuai dengan intisari Undang-Undang. Meski begitu, ChatGPT tidak menyediakan salinan dokumen asli UU tersebut, yang merupakan keterbatasan signifikan ketika digunakan untuk riset hukum yang membutuhkan sumber primer.

Lebih lanjut berdasarkan penelitian ini,, Gemini mampu menemukan informasi yang akurat dalam satu kali percobaan dan memberikan intisari Undang-Undang yang relevan. Namun, sama seperti ChatGPT, platform ini juga tidak menyediakan salinan dokumen resmi UU. Oleh karenanya, informasi yang diberikan masih perlu diverifikasi melalui sumber lain.

Kemudian ketika pencarian dilakukan menggunakan Ask Hukumonline AI, muncul hasil yang akurat dalam satu kali pencarian. Hasil pencarian pun disertai dengan salinan dokumen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Hal ini menjadikan Ask Hukumonline AI sebagai platform yang paling andal dan akurat untuk riset hukum, terutama karena menyediakan akses langsung ke dokumen hukum resmi. Sebagai kesimpulan, Ask Hukumonline AI terbukti paling efektif dibandingkan ChatGPT maupun Gemini dalam mendukung optimalisasi riset hukum dengan menyediakan informasi yang akurat dan salinan dokumen peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- ChatGPT. (2024, August 4). Conversation. Retrieved August 4, 2024, from <https://chatgpt.com/c/692e0458-ab0b-44f0-a076-cb2526c558ef>
- Google Gemini. (n.d.). Gemini search. Retrieved August 4, 2024, from <https://gemini.google.com/app/bc50fbf606089745>
- Hukumonline. (2022, August 10). Akademisi sebut pentingnya pemanfaatan teknologi untuk hukum yang inovatif dan adaptif. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-sebut-pentingnya-pemanfaatan-teknologi-untuk-hukum-yang-inovatif-dan-adaptif-lt62f38e9c9b4f6/?page=1>
- Hukumonline Pro. (n.d.). Specific question. Retrieved August 4, 2024, from <https://pro.hukumonline.com/workspace/ask-ai/specific-question/?guid=afWbxu73D6o3OcnizVoF>
- Kabir, M. S., & Alam, M. N. (2023, August). The role of AI technology for legal research and decision making. Amity University Dubai.
- Staiku. (n.d.). Tiga jenis metode penelitian yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah. Retrieved August 4, 2024, from <https://staiku.ac.id/blog/tiga-jenis-metode-penelitian-yang-umum-digunakan-dalam-penelitian-ilmiah/>
- Syaddad, A. (2023, October 12). Menkumham: Akses informasi hukum nasional harus dibuka seluas-luasnya. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6979450/menkumham-akses-informasi-hukum-nasional-harus-dibuka-seluas-luasnya>